

**AKIBAT PERCERAIAN NIKAH *SIRRI* TERHADAP ANAK
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Masyarakat Desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah



Oleh :

FAISAL ZUSFI
NIM.10521001046

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1432 H / 2012 M**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Akibat Perceraian Nikah *Sirri* Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang)”**. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW selaku utusan Allah SWT yang membawa risalahnya kepada umat manusia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat izin Allah SWT dan atas bantuan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, Alhamdulillah semuanya bisa di atasi. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ayahanda tercinta M. Syafi'i M, dan ibunda tercinta Zubaidah yang telah mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan penulis dan memberikan kasih sayang, perhatian serta senantiasa mendo'akan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh terhadap agama dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. serta seluruh keluarga yang turut mendo'akan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor dan bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, bapak ketua serta ibu sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah yang memberikan kesempatan perhatian dan fasilitas kepada penulis selama pendidikan dan khususnya selama penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dra. Hj. Nurhasanah, M.A selaku pembimbing yang telah memberikan perhatian, pengarahan, bimbingan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum karyawan-karyawati yang telah mendidik dan membantu penulis selama perkuliahan ini.
5. Bapak pimpinan beserta staf pustaka UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas perpustakaan kepada penulis selama perkuliahan ini.
6. Bapak Kepala desa Puau Lawas Bangkinang Seberang yang telah memberikan bantuan informasi dalam penulisan skripsi ini
7. Tokoh masyarakat yang telah bersedia diwawancarai dalam membantu penulisan guna mendapatkan data yang diperlukan.
8. Adek-adekku yang ku sayangi, terima kasih telah memberi semangat dan dorongan yang menjadi
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 serta semua pihak yang telah memberikan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, masih terdapat kelemahan baik dari segi materi, teknik penulisan dan segi bahasa yang disampaikan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi yang membacanya sekurang-kurangnya bagi penulis. Amin.....

Pekanbaru, 14 Juni 2011
Penulis

FAISAL ZUSFI
NIM.10521001046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN SKRIPSI

NOTA PEMBIMBING

PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : GAMBARAN UMUM DESA PULAU LAWAS	
A. Geografis dan Demografis	13
B. Kehidupan Beragama	15
C. Pendidikan	17
D. Adat Istiadat dan Sosial Budaya	19
BAB III : TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Pernikahan.....	22
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	27
D. Tujuan Pernikahan	31
E. Pengertian Nikah Sirri.....	32
F. Sebab-sebab Nikah Sirri.....	35

G. Bentuk-bentuk Nikah Sirri	41
H. Pengasuhan Anak Setelah Perceraian	42
BAB IV : AKIBAT PERCERAIAN NIKAH SIRRI TERHADAP ANAK	
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Akibat Perceraian Nikah Sirri Terhadap Stats Sosial Anak	
Setelah Terjadinya Perceraian.....	47
B. Akibatnya Terhadap Nafkah Anak Setelah	
Terjadinya Perceraian.....	52
C. Tinjauan Hukum Islam.....	56
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Akibat Perceraian Nikah Sirri Terhadap Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang)”**.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masyarakat yang melakukan nikah sirri kemudian terjadi perceraian sehingga anak yang menjadi korban terhadap perceraian tersebut. Adapun perceraian ini berakibat pada nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang anak, yang mana ayah tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak setelah perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat perceraian nikah sirri terhadap anak, akibat nafkah anak setelah perceraian, tinjauan hukum Islam akibat perceraian niakah sirri terhadap anak dan nafkah setelah perceraian pada masyarakat matrilineal di desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang. Adapun bentuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya data tersebut adalah berasal dari data yang diperoleh apa adanya di lapangan dan dipaparkan apa adanya dalam bentuk penjelasan dan kebijakan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan perceraian nikah sirri sebanyak 5 orang maka populasi dijadikan sampel (*metode sensus.*)

Kemudian untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan angket. Perlu untuk diketahui bahwa sebelum penulis turun kelapangan untuk mewawancarai responden, maka penulis terlebih dahulu membuat pedoman format wawancara, yang berguna agar dalam wawancara responden tidak menyimpang dari fokus penelitian yang telah ditentukan. Setelah semua data-data dapat terkumpul maka penulis meneruskan pada menganalisa data penelitian dengan teliti berdasarkan indikator penelitian dan disesuaikan dengan apa adanya yang telah disampaikan oleh pendapat dari responden.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa Pernikahan yang dilakukan secara sirri apabila terjadi perceraian maka dampaknya terhadap anak sangat besar yaitu berdampak pada sikap, kesehatan jasmani dan rohani anak, terhadap pendidikannya dan juga biaya hidup, sehingga pelaksanaan pengasuhan anak dan nafkah setelah perceraian lebih di titik beratkan kepada ibu, yang mana pihak bapak lebih banyak mengabaikan tanggung jawabnya dalam nafkah. Menurut Pandangan Islam, Islam menuntut bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Status Wilayah Tanah Desa Menurut Jenis Penggunaannya -----	14
Tabel II	: Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Lawas Berdasarkan Jenis Kelamin -----	14
Tabel III	: Klasifikasi Penduduk Desa Pulau Lawas Berdasarkan Jenis Agama Dan Penganutnya-----	15
Tabel IV	: Jumlah Lembaga Keagamaan Desa Pulau Lawas Tahun 2009/2010 -----	16
Tabel V	: Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Pulau Lawas -----	17
Tabel VI	: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pulau Lawas-----	18
Tabel VII	: Dampak Yang Ditimbulkan Dari Perceraian Nikah <i>Sirri</i> Terhadap Anak -----	48
Tabel VIII	: Kondisi Anak Setelah Terjadinya Perceraian -----	49
Tabel IX	: Setelah Bercerai Yang Mengasuh Anak-Anak -----	50
Tabel X	: Mantan Suami Ibu Pernah Meluangkan Waktu Khusus Bersama Anak-Anak -----	51
Tabel XI	: Nafkah Anak Setelah Perceraian Oleh Suami -----	53
Tabel XII	: Perhatian Mantan Suami Terhadap Pembiayaan Pendidikan Anak Setelahperceraian -----	54
Tabel XIII	: Perhatian Mantan Suami Terhadap Kesehatan Anak Setelah Perceraian-----	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Pulau Lawas adalah satu desa yang terdapat di kecamatan Bangkinang Seberang, sebuah kecamatan baru yang terbentuk beberapa waktu lalu hasil dari pemekaran kecamatan Bangkinang, kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kabupaten Kampar yang dijuluki serambi mekkahnya Provinsi Riau, setidaknya ini merupakan gambaran bahwa kabupaten ini pada umumnya dan desa Pulau Lawas khususnya, dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai macam latar belakang keturunan, pendidikan, agama, suku, dan budaya, sehingga perkembangan desa ini berkembang begitu pesat.

Kehidupan beragama pada masyarakat desa Pulau Lawas ini mayoritas beragama Islam. Selain itu, kehidupan masyarakat di desa Pulau Lawas ini terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Jawa, Melayu, Minang, Batak, dan lain-lain. Sedangkan pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di desa Pulau Lawas ini terdiri dari berbagai profesi diantaranya adalah petani, pedagang, wiraswasta, aparat keamanan, pegawai negeri sipil, dan lain-lainnya.¹

Manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perkawinan merupakan jalan keluarnya“ Perkawinan itu disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan

¹ Sumber Data Kantor Camat Bangkinang Seberang.

keluarga yang sah menuju keluarga bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi”. Menurut Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa: ”Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Penjelasan di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, material dan spiritual demi kebahagiaan dunia dan akhirat, yang mencakup syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dari perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan.²

Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani.³

Al-Qur'an menyebutkan dalam surat ar-Rum ayat 21 tentang perkawinan seperti :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

² Undang-Undang No.1 Tahun 1972, Pasal 22

³ Nurdin, dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2006), hlm. 42-43

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. “ (Q.S. Ar Ruum)*⁴

Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah *mawaddah, warahmah*” perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyari’atkannya perkawinan tercapai.⁵ Perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat, baik syarat yang telah diatur dalam hukum Islam yang berlaku di suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya kesesuaian antara rukun dan syarat perkawinan yang diatur oleh hukum islam itu sendiri, diantara syarat-syarat untuk melakukan perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.⁶

Kenyataan dalam masyarakat desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang ada beberapa orang yang melaksanakan perkawinan padahal ada rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam yang tidak terpenuhi atau ada larangan-larangan yang telah di langgar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat oleh suatu perkawinan lama, dan melangsungkan perkawinan baru

⁴ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya : CV. Toha Putra, 1989),h. 644

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 70

⁶ Ramulyo Idris, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 50, Kompilasi Hukum Islam pasal 14

tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin istri pertama, perkawinan semacam ini menyimpang dari ketentuan syari'at islam.

Masyarakat ada yang tidak mengetahui prosedur dari melaksanakan perkawinan, sehingga akibatnya melakukan perkawinan dibawah tangan, kawin sirri, ataupun perkawinan yang tidak melengkapi syarat-syarat dari perkawinan diantaranya : poligami tanpa izin dari pengadilan agama, mengawini perempuan ternyata masih menjadi istri pria lain, perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah, perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, melanggar batas umur perkawinan, perkawinan dengan paksaan.⁷

Sementara menurut undang-undang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

⁷ Ramulyo Idris, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 86

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat desa Pulau Lawas khususnya sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintahan atau perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama bagi yang beragama islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan nikah sirri dikenal juga dengan istilah nikah di bawah tangan.⁸

Berdasarkan pengamatan penulis di desa Pulau Lawas, bahwa nikah *Sirri* sangat besar dampaknya terhadap anak, apabila terjadi perceraian antara suami istri. Penulis melihat bahwa dampak yang terjadi dari perceraian nikah *Sirri* adalah anak dan istrinya tidak diberi nafkah, sehingga ibu yang bekerja keras untuk menghidupi anaknya, kurangnya perhatian pada kesehatan dan pendidikan anak, dan terjadinya perubahan sikap setelah terjadinya pereraian.

⁸ Burhanuddin S, *Nikah Siri*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisa, 2010), Cet 1, hlm. 13

Dari hasil wawancara penulis dengan responden dampak dari perceraian tersebut adalah bahwa anak tidak terdidik sehingga anak menjadi orang yang tidak berkelakuan baik, kadang anak sering juga menderita sakit sehingga pertumbuhan fisik anak terhambat karena kurangnya perhatian ayah terhadap pembiayaan kesehatan anak.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang sebagai berikut :

Adapun kasus yang penulis temukan bahwa ada beberapa orang yang melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan istrinya, seperti si Badu menikah dengan Asri, namun di tempat yang lain Badu juga menikah dengan wanita lain yang bernama Wati yang dinikahinya secara *sirri* tanpa sepengetahuan istri pertamanya yaitu Asri.⁹

Kasus yang lainnya adalah Andre menikah *sirri* dengan Asti, selama perkawinannya mereka sudah mempunyai anak, padahal ia juga sudah mempunyai isteri yang dinikahi secara sah dan tercatat.¹⁰

Kejadian tersebut diketahui oleh masyarakat dan sempat menimbulkan konflik antara mereka sehingga menimbulkan pembatalan perkawinan atas pernikahan yang terjadi tanpa sepengetahuan isteri pertama.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh salah seorang masyarakat bahwa dia pernah melihat suami dari Asri bersama dengan wanita lain, wanita itu adalah istri keduanya yang sudah mempunyai anak dari hasil perkawinannya tersebut,

⁹ Sari, Masyarakat, Wawancara, desa Pulau Lawas, tanggal 25 Oktober 2010

¹⁰ Ratih, Masyarakat, Wawancara, desa Pulau Lawas, tanggal 25 Oktober 2010

dan kemudian ia melaporkan kepada istri pertamanya bahwa suaminya menikah lagi dengan wanita lain.¹¹

Begitu juga halnya dengan kasus Andre, dia menikah dengan wanita lain di daerah lain tanpa sepengetahuan dari istrinya yang pertama, kemudian istrinya yang pertama mengetahui akan hal tersebut, kemudian dari pihak istri menuntut supaya perkawinan mereka dibatalkan.¹²

Adapun akibat yang ditimbulkan dari perceraian nikah *Sirri* tersebut adalah tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana layaknya seorang anak, sehingga pertumbuhannya terhambat. Sedangkan dari segi mental, anak menjadi trauma dan merasa takut karena dia merasa bersalah atas berpisah ayah dan ibunya.

Sebagaimana yang diceritakan oleh responden sejak perkawinannya diketahui oleh istri pertama dari suaminya, kehidupannya berubah drastis. Keuangan rumah tangganya menjadi tidak menentu ditambah lagi fisik/mental anaknya sejak tidak melihat ayahnya di rumah lagi, serta tidak ada lagi yang menafkahi dia dan anaknya baik untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anaknya. Bahkan istri pertama menahan seluruh harta yang diberikan oleh suaminya dan tidak mengizinkan suaminya memberikan harta sedikitpun untuk dirinya, karena istri pertamanya tidak rela hartanya diberikan pada wanita lain.¹³

Berdasarkan fenomena di atas, dengan dianggapnya sebuah perkawinan yang tidak pernah terjadi menurut hukum, sebagai konsekuensi hukum dari

¹¹ Kodri, Masyarakat. *Wawancara*, desa Pulau Lawas, tanggal 25 Oktober 2010

¹² Khairuddin, Masyarakat, *Wawancara*, desa Pulau Lawas, tanggal 25 Oktober 2010

¹³ Wati (istri yang diceraikan), *Wawancara*, desa Pulau Lawas, tanggal 28 November 2010

perkawinan tersebut yang dilakukannya secara *sirri*, maka timbul masalah yakni bagaimana akibat dari perceraian tersebut terhadap anak, baik secara fisik dan materi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **AKIBAT PERCERAIAN NIKAH *SIRRI* TERHADAP ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI MASYARAKAT DESA PULAU LAWAS BANGKINANG SEBERANG).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melakukan pembahasan agar mudah dipahami, maka penulis membatasi penelitian ini tentang akibat perceraian nikah *sirri* terhadap anak ditinjau menurut Hukum Islam pada tahun 2006-2008

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat perceraian nikah *sirri* terhadap kondisi sosial anak setelah perceraian?
2. Bagaimana akibatnya terhadap nafkah anak setelah terjadinya perceraian?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hal tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui akibat perceraian nikah *sirri* terhadap anak setelah perceraian.

- b. Untuk mengetahui akibatnya terhadap nafkah istri dan anak setelah perceraian.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam akibat dari perceraian nikah *sirri* tersebut terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi Kepada masyarakat dalam masalah nikah *sirri*.
- b. Menambah khasanah kajian Islam dan pengetahuan serta wawasan bagi penulis khususnya dan umumnya masyarakat.
- c. Untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang. Dipilihnya lokasi ini karena sangat mudah dijangkau, biaya tidak banyak, tidak jauh dari tempat tinggal, dan penelitian ini berkenaan dengan judul yang diteliti, bahwasanya ada terjadi perceraian nikah *Sirri* yang berdampak besar terhadap anak.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah terjadinya perceraian nikah secara *sirri* dan akibatnya terhadap nafkah anak.

3. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah responden yang melakukan pernikahan *sirri*.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perceraian nikah *sirri* pada tahun 2006-2008 sebanyak 5 pasang. Karena jumlah populasinya terbatas maka populasinya dijadikan sampel (*metode sensus*).

5. Sumber Data

- a. Data primer, dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dari subjek penelitian atau dari pihak yang terkait dengan akibat terjadi perceraian nikah secara *sirri* terhadap nafkah anak
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, atau arsip-arsip resmi yang relevan dengan penelitian ini

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi tempat diadakannya penelitian untuk mendapatkan gambaran dan informasi dengan jelas.

b. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memberikan informasi untuk penelitian ini. Dimana informan tidak merasa dirinya sedang diwawancarai sehingga informasi yang didapat benar-benar murni tanpa rekayasa.

c. Angket

Yaitu mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan memberi alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan kepada responden, yang berkenaan dengan akibat perceraian nikah *Sirri* terhadap anak. Penyebaran angket ini bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dan lebih akurat.

7. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah analisa data Kualitatif adalah data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan dan dibandingkan yang satu dan yang lainnya. Sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Metode Penulisan

- a. Metode induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

- b. Metode deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara khusus.
- c. Metode deskriptif yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran umum tentang desa Pulau Lawas yang terdiri dari demografi dan geografi, kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat dan sosial budaya.
- BAB III : Tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian nikah *sirri*, sebab-sebab nikah *sirri*, pengasuhan anak setelah perceraian.
- BAB IV : Akibat perceraian nikah *sirri* terhadap anak ditinjau menurut Hukum Islam yang terdiri dari : akibat perceraian nikah *sirri* terhadap kondisi sosial anak setelah perceraian, akibatnya terhadap nafkah anak setelah perceraian, serta tinjauan Hukum Islam terhadap hal tersebut.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demografi

Desa Pulau Lawas merupakan bagian dari kecamatan Bangkinang Seberang, yang berjarak lebih kurang satu kilo meter dari pusat ibu kota Kabupaten Kampar. Luas wilayahnya adalah 974 Ha, desa ini terdiri dari tiga dusun, yaitu :

1. Dusun Kampung Gadang
2. Dusun Kampung Deling
3. Dusun Pulau Lawas ¹

Daerah desa Pulau Lawas kecamatan Bangkinang Seberang dan sekitarnya terletak antara $21^0 - 25^0$ LU, $8^0 - 20^0$ LS, $143^0 - 92^0$ BT, dan $162^0 - 64^0$.² Desa pulau lawas secara geografis berbatasan dengan desa atau daerah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Pasir Sialang
2. Sebelah timur berbatsan dengan sungai Kampar
3. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Bangkinang
4. Sebelah barat berbatasan dengan desa Muara Uwai

Desa Pulau Lawas mempunyai iklim sedang, yaitu sekitar $26^0 - 30^0$ dan terletak pada 10,30 M dari permukaan laut. Untuk mengetahui penggunaan wilayah tanah desa Pulau Lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

¹ Data diperoleh dari kantor Kepala Desa Pulau Lawas pada tanggal 26 Maret 2011

² Data diperoleh dari kantor Camat Kec. Bangkinang Seberang pada tanggal 29 Maret

TABEL I
STATUS WILAYAH TANAH DESA MENURUT JENIS
PENGGUNAANNYA

No	Bentuk Lokasi	Luas Area
1	Tanah Sawah	7 Ha
2	Tanah Perkebunan	365 Ha
3	Tanah Pemukiman	462 Ha
4	Lain-lain	140 Ha
Jumlah		974 Ha

Sumber data : Monografi Desa Pulau Lawas 2010

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat desa Pulau Lawas tergambar bahwa penggunaan tanah lebih banyak terpakai untuk pemukiman, hal ini dapat dilihat dari luasnya areal tanah yang dijadikan sebagai pemukiman.

Penduduk desa Pulau Lawas sebagian besar merupakan penduduk asli yang sudah turun temurun sejak lama. Berdasarkan data statistik tahun 2010 penduduk desa Pulau Lawas berjumlah 2.901 dan terdiri dari 727 KK , juga dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin dan dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL II
KLASIFIKASI PENDUDUK DESA PULAU LAWAS BERDASARKAN
JENIS KELAMIN

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1.292 Orang	44.54 %
2	Perempuan	1.609 Orang	55.46 %
Jumlah		2.901 Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Pulau Lawas, 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan, yaitu laki-laki berjumlah 1.292 orang atau 44,54 % sedangkan Penduduk perempuan berjumlah 1.609 orang atau 55,46 %.

B. Kehidupan Beragama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di dunia ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia.

Penduduk desa Pulau Lawas, seluruh komponen masyarakatnya beragama islam, tidak ada agama lain yang berkembang di daerah ini. Dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk desa Pulau Lawas kebanyakan mencerminkan budaya Islami.

TABEL III
KLASIFIKASI PENDUDUK DESA PULAU LAWAS BERDASARKAN
JENIS AGAMA DAN PENGANUTNYA

No	Jenis Agama	Jumlah Penganutnya	Persentase
1	Islam	2.901 Orang	100%
2	Budha	-	-
3	kristen	-	-
4	Hindu	-	-
5	Konghucu	-	-
Jumlah		2.901 Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Pulau Lawas, 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Islam dianut oleh seluruh masyarakat desa Pulau Lawas yaitu 2.901 orang (100%) dari komposisi penduduk yang ada, maka sudah semestinya nilai-nilai Islam itu membudaya dalam kehidupan masyarakat.

Penduduk desa Pulau Lawas seluruhnya beragama Islam, kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yaitu 3 buah mesjid dan 5 buah mushalla. Rumah ibadah tersebut selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar Al-Qur'an dan wirid pengajian dan kegiatan agama lain.

TABEL IV
JUMLAH LEMBAGA KEAGAMAAN DESA PULAU LAWAS
TAHUN 2009/2010

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla	5
3	Gereja	-
4	Pura	-
Jumlah		8

Sumber Data : Kantor Desa Pulau Lawas, 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di desa Pulau Lawas adalah sebanyak 3 buah masjid dan 5 buah mushalla, gereja dan pura tidak ada. Dari data di atas jelas bahwa di desa Pulau Lawas masyarakatnya beragama Islam.

C. Pendidikan

Penduduk desa Pulau Lawas minoritas sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri dan swasta.

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut.

Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Pulau Lawas bisa dilihat melalui tabel berikut :

TABEL V
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA PULAU LAWAS

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	1
2	Sekolah Dasar	3
3	MDA	3
4	MAN	1
Jumlah		8

Sumber Data : Kantor Desa Pulau Lawas, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di desa Pulau Lawas terdapat 1 unit Taman Kanak-kanak, 3 unit Sekolah Dasar Negri, 3 unit Madrasah Diniyah Awaliyah, dan 1 unit MAN.

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada maka sebagian besar anak yang telah lulus Sekolah Menengah Atas melanjutkan pendidikannya ketempat lain atau kota lain, seperti kota Pekanbaru, Padang, dan lain-lain.

Di desa Pulau Lawas tidak hanya sarana pendidikannya terbatas, tapi tingkat pendidikan penduduknya juga rendah sekali. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penduduk yang tidak tamat sekolah, bahkan ada diantara mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Sedangkan yang melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sangat sedikit sekali. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL VI
TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA PULAU LAWAS

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	510 orang	17.37 %
2	SD sederajat	350 orang	13.00 %
3	SLTP sederajat	369 orang	12.00 %
4	SLTA sederajat	375 orang	13.00 %
5	Akademi	379 orang	13.00 %
6	Perguruan Tinggi	210 orang	7.23 %
7	Tidak tamat sekolah	708 orang	24.40 %
Jumlah		2.901 Orang	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Pulau Lawas, 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir sebagian masyarakat desa Pulau Lawas tidak tamat sekolah, sedangkan yang melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi sangat sedikit sekali. Hal tersebut terjadi karena masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan sudah merasa cukup jika anak-anaknya sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama saja. Anggapan ini juga didukung oleh keterbatasan biaya bagi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

D. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Negara Republik Indonesia sangat dikenal akan keragaman suku bangsa, bahasa, adat dan kebudayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Begitu juga halnya dengan keadaan desa pulau lawas yang terdiri dari bermacam suku, seperti : suku Melayu, Mandeliang, Domo, Piliang, dan lain sebagainya. Walaupun mereka berbeda dalam suku namun dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup rukun dan damai tanpa ada perpecahan antara yang satu dengan yang lainnya.

Sistem kekerabatan atau kekeluargaan di desa Pulau Lawas adalah berdasarkan garis keturunan ibu (Matrilinial), sehingga setiap anak dan kepenakan lebih dekat dan akrab dengan ibu dan saudara ibu serta kerabat dari nenek, begitu juga pola persukuan anak yaitu mengikuti suku ibu, sehingga seluruh anak akan bersuku pada suku ibu.

Selanjutnya menurut adat di desa Pulau Lawas anak perempuan mewarisi harta pusaka dari orang tuanya, sebab anak perempuan dianggap penerus garis keturunan yang berpola matrilineal

Desa pulau lawas terdapat berbagai macam budaya yang melekat pada penduduk diantaranya, yaitu : ³

1. Hari Raya Enam yang juga disebut Ziarah Kubur

Tradisi ziarah kubur biasanya dilakukan sebagian masyarakat Kabupaten Kampar, pada bulan Syawal setelah puasa enam. Dalam tradisi ziarah kubur ini masyarakat berbondong-bondong khususnya kaum laki-laki datang ke kuburan dalam rangka membacakan do'a untuk arwah-arwah kaum muslimin yang telah berpulang kerahmatullah, selanjutnya pada waktu tengah hari diadakan makan *baselo* secara bersama di surau atau di masjid yang mana hidangannya telah disediakan oleh kaum ibu-ibu dari setiap rumah. Demikian juga halnya dengan masyarakat kecamatan Bangkinang Seberang yang melakukan hari raya enam dan ziarah kubur.

2. Upacara kematian

Apabila ada warga yang meninggal dunia, maka warga yang lainnya berbondong-bondong untuk berta'ziah dengan membawa beras dan secerek air yang digunakan untuk keperluan mengurus jenazah. Setelah tujuh hari berselang, masyarakat kembali diundang untuk mendoa'akan si mayat, demikian juga untuk 14 hari bahkan sampai 100 hari kematian.

3. Balimau kasai

Tradisi balimau kasai dilakukan dalam rangka ikut bersuka cita ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dimana tradisi ini hampir

³ Ash'ari, (pemuka adat), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas tanggal 30 Maret 2011

terdapat pada sebagian besar masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Kampar.

Dalam tradisi ini biasanya masyarakat berbondong-bondong menuju tempat yang telah ditentukan yang diiringi dengan dzikir disertai dengan sampan hias yang memadati sungai Kampar. Tradisi ini merupakan tradisi yang paling ramai pengunjungnya, jika dibandingkan dengan tradisi-tradisi lainnya yang ada di daerah ini.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari kata bahasa arab : - يَنْكِحُ - yang secara etimologi berarti : menikah (). Dalam bahasa arab, lafadh “nikah” bermakna berakad (), bersetubuh () dan bersenang-senang (). Sedangkan secara terminologi, istilah nikah berarti akad (*ijab qabul*) yang menghalalkan hubungan antara pria dengan wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga menurut syarat dan rukun tertentu.¹

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.²

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' : ayat 1, sebagai berikut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴿١﴾

¹ Burhanuddin S, *op.cit.*, h 30.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), cet 1, h 9.

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*³

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dengan betina seperti tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridhoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam islam untuk selamanya

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafiyah, pengertian nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

³ DEPAG RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : CV toha putra, 1989), h 114

2. Menurut ulama Syafi'iyah, pengertian nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *wati*'. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Menurut ulama Malikiyah, pengertian nikah adalah suatu akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan sesama manusia.
4. Menurut ulama Hanabilah, pengertian nikah adalah akad dengan lafal nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang dan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁴

Dari beberapa pengertian nikah di atas maka dapat penulis kemukakan bahwa pernikahan adalah kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang (haram) menjadi halal. Dewasa ini, sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah telah memasukkan unsur lain yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

B. Dasar dan Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah sebahagian kodrat alamiah dan sunnatullah diatur sedemikian rupa, melalui ketentuan dan syarat oleh islam, hal ini dapat

⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hal 9-11

ditemukan sumbernya dalam al qur'an dan hadits seperti yang tersebut di bawah ini :

1. Surat al-zariah ayat 49 yaitu :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*.⁵

2. Surat an-nisa' ayat 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya^[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*⁶

Dinyatakan dalam hadits terdapat pula dasar-dasar hukum nikah yatu :
riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah bersabda :

يامعشر الشباب فليتزوج فانه
يستطع فعليه فانه له (عليه)

Artinya : *wahai kaum pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara faraj. Barang siapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng (Muttafaq 'Alaih)*⁷

Meskipun nash menyatakan bahwa pada dasarnya hukum nikah itu sunnah, ulama fiqih berpendapat bahwa hukum perkawinan bagi setiap orang

⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 862

⁶ *ibid*, h. 710

⁷ Shekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Shoheh Bukhori*, (Beirut : Darul Fikri, 1994), juz 6, h. 143

biasa berubah apabila dilihat dari segi keadaan orang tersebut, baik dari segi lahir dan batin.

1. Perkawinan hukumnya wajib apabila seseorang telah mempunyai kemampuan dan merasa khawatir akan terjerumus
2. Perkawinan hukumnya sunnah apabila seseorang telah mempunyai kemampuan tetapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus kedalam perbuatan zina.
3. Perkawinan hukumnya haram apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu dan perkawinan itu dilaksanakannya untuk menganiaya wanita yang dinikahi.
4. Perkawinan hukumnya makruh apabila laki-laki yang akan menikah itu merasa dirinya akan berbuat zalim terhadap wanita yang akan dinikahi.
5. Perkawinan hukumnya mubah (boleh) apabila seseorang tidak merasa khawatir akan terjerumus kelembah maksiat dan juga tidak akan berbuat zalim terhadap istrinya, sementara keinginannya untuk kawin tidak begitu kuat dan halangan untuk kawin pun tidak ada.

Selanjutnya menurut Al Hamdani dalam Risalah Nikah, membagi hukum perkawinan berdasarkan situasi dan kondisi orang yang akan melakukan perkawinan tersebut kepada empat macam, yaitu : ⁸

1. Nikah Wajib; nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah taqwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina,

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1995), Cet. Ke-10, h.22

karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah

2. Nikah haram; nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah sunnah; nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan dalam islam.
4. Nikah mubah; yitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nuikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari pendapat Al Hamdani di atas, hukum nikah ahanya empat, yaitu wajib, haram, sunnah, dan mubah. Sedangkan hokum makruh seperti yang dikemukakan oleh Dahlan Abdul Aziz di atas sudah tergolong kepada hukum haram menurut Al Hamdani.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

1. Pengertian Rukun dan Syarat Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,

seperti membasuh muka untuk wudhu' dan *takbiratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.⁹

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika kompilasi menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan yang tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.¹⁰

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Karena itulah perkawinan yang sarat nilai dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

⁹ Abd. Rahman Ghzali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 46

¹⁰ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 69-70.

perlu diatur dengan sarat dan rukun tertentu, agar tujuan disari'atkannya tercapai.

2. Rukun dan Syarat-syarat Nikah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam, akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
 - 2) Beragama islam
 - 3) Laki-laki
 - 4) Jelas orangnya
 - 5) Dapat memberikan persetujuan
 - 6) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
 - 1) Beragama
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat diminta persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya :

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab dan qabul
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Ijab qabul, syarat-saratnya :

- 1) adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram/umrah
- 7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu, calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.¹¹

¹¹ *ibid.*, h 71-72

D. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹²

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam hadits :

(لَهَا وَلِحُسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا)

Artinya : “Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.”
(H.R. Bukhari dan Muslim).¹³

Melalui hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harata dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.

Menikah bukanlah hanya untuk menjalin hubungan suami istri di dunia belaka, namun menikah adalah perjuangan dua insan untuk mencapai kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat. Menikah merupakan bagian ibadah yang mulia untuk menyempurnakan sebagian dari agama seseorang.

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, h 12

¹³ Shekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Shoheh Bukhori, op.cit.*, h 150

Adapun tujuan dari pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji.
2. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.
3. Naluri keibuan dan kebapakan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumahtangga bersama anak-anak.
4. Melahirkan organisasi (tim) dengan pembagian tugas/tanggungjawab tertentu, serta melatih kemampuan bekerjasama.
5. Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga, sehingga memupuk rasa sosial dan dapat membentuk masyarakat yang kuat serta bahagia.

E. Pengertian Nikah *Sirri*

Nikah *sirri* atau disebut nikah di bawah tangan. Nikah *sirri* cukup dengan adanya wali dari mempelai perempuan, ijab-qabul, mahar dan dua orang saksi laki-laki serta tidak perlu melibatkan petugas dari Kantor Urusan Agama setempat. Niah *sirri* biasanya dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya dengan resepsi. Selain itu, biasa alasannya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.¹⁴

Kata *siri* secara etimologi berasal dari bahasa Arab *assirru* yang mempunyai arti “rahasia”. Menurut faridl, pengertian nikah *sirri* terdapat dua

¹⁴ Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Insani Madani, 2007), h. 84

kemungkinan, yaitu *pertama*, nikah yang dilaksanakan hanya sesuai dengan ketentuan agama, tidak dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). *Kedua*, nikah *sirri* yang mengandung arti sembunyi atau tidak dipublikasikan, dalam ajaran islam tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan fitnah, buruk sangka terhadap yang bersangkutan yaitu suami-istri.

Dan dilain pihak mengatakan bahwa nikah *sirri* adalah perkawinan yang dilakukan dalam ruang yang terbatas dan tidak dilakukan pencatatan maupun pengawasan oleh petugas KUA sehingga tidak memperoleh Akta Nikah. Hal ini dimaksudkan sebagai cara untuk menghindar dari ketentuan hukum pernikahan (perkawinan).¹⁵

Menurut Zuhdi dalam terminologi Fiqh Maliki, nikah *sirri* ialah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jemaahnya sekalipun keluarga setempat. Menurut terminologi ini, nikah *sirri* adalah tidak sah, sebab nikah sirri selain dapat mengundang fitnah, *tuhmah* dan *suudz-dzan* juga bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW.¹⁶ Yang berbunyi :

: عليه : عنه
() ذهب

¹⁵ Efii Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar*, (Bandung : Kepustakaan Eja Insane, 2005), Cet. Ke-1, h. 5

¹⁶ *Ibid*, h. 36

Artinya : “*Dari Anas r.a. ia berkata Rasulullah bersabda : “adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing.” (H.R. Bukhari)*¹⁷

Menurut Aulawi, sebelum lahir undang-undang perkawinan, di masyarakat telah ada pernikahan yang disebut dengan nikah *sirri*. Pengertian nikah *sirri* mengalami perkembangan dan diartikan secara lebih luas. Zuhdi membagi pengertian nikah *sirri* menjadi tiga bagian :

1. Nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari’at agama, bersifat intern keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum dilakukan resepsi pernikahan, suami-sitri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri karena istri pada umumnya masih anak-anak.
2. Nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syari’at Islam, dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah. Namun, nikahnya bersifat intern keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami-istri karena mungkin salah satu atau keduanya masih menyelesaikan studinya atau belum memperoleh pekerjaan.
3. Nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam karena terbentur dengan peraturan pemerintah. Pada pernikahan ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami-istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Pada umumnya nikah ini tanpa persetujuan istri terdahulu, atasannya, dan pejabat yang berwenang

¹⁷ Shekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Shoheh Bukhori, op.cit.*, h. 169

serta izin pengadilan agama dan mempunyai motif untuk menghindari zina.¹⁸

F. Sebab-sebab Nikah *Sirri*

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan *sirri* dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatat resmi. Begitupula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian dilakukan di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun disisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syari'at agama.

a. Zina akibat berkhawat

Tidak semua orang memiliki kesiapan mental untuk menikah, apalagi disebabkan oleh faktor hubungan seksual di luar nikah (zina) akibat pacaran (khalwat) yang berkepanjangan. Rasa penyesalan atas dosa yang telah dilakukan serta tuntutan tanggung jawab untuk melanjutkan hubungan kasih sayang, terkadang memaksa seseorang untuk keluar dari kenyataan, meskipun dengan cara yang tidak lazim, seperti melakukan pernikahan *sirri*. Bagi seorang laki-laki, pernikahan dapat dijadikan sebagai jalan untuk membuktikan adanya kasih sayang dan tuntutan rasa tanggung jawab dari seorang wanita yang baru dikenalnya.

¹⁸ Effi Setiawati, *op.cit.*, h. 37

b. Nikah Mut'ah

Tidak semua orang yang melangsungkan pernikahan mampu mempertahankan rumah tangganya hingga akhir hayatnya. Banyak pernikahan lantaran sebab-sebab tertentu harus berakhir dengan perceraian. Bahkan ada sebagian kalangan yang bersedia menikah hanya untuk jangka waktu tertentu sebelum kemudian bercerai kembali. Dalam istilah fiqh bentuk pernikahan semacam ini di kenal dengan sebutan nikah mut'ah.¹⁹ Perlu diketahui, bahwa meskipun nikah mut'ah pada mulanya pernah diperbolehkan, namun sekarang prakteknya telah diharamkan.

Putusnya perkawinan (perceraian) hanya dapat terjadi karena sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan oleh hakim di pengadilan. Artinya, tanpa adanya sebab-sebab tertentu, suatu perceraian tidak boleh terjadi begitu saja. Bahkan sebelum ada putusan hakim, tuntutan perceraian pada tingkatan tertentu dapat dibatalkan atau dirujuk kembali dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, di Indonesia, kriteria yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai dapat dilihat pada undang-undang yang berdasarkan pada prinsip syariah atau peraturan lain yang terkait dengannya. Ketentuan ini tentu sulit berlaku pada nikah sirri yang tidak tercatat secara resmi.

Biasanya orang yang mempunyai niat menikah tetapi hanya untuk sementara waktu (bercerai), ada kecendrungan akan mengambil jalan nikah sirri. Trend nikah sirri dijadikan sebagai pilihan, karena dinilai dari segi prosedur, juga dapat membebaskan para pelakunya dari beban hukum.

¹⁹ Abustani Ilyas, *Nikah Mut'ah Dalam Islam* (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), h. 52

Akibatnya, mempelai wanita yang seharusnya mendapatkan perlindungan hokum terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi tidak menentu nasibnya. Suatu pernikahan yang sejak awalnya diniatkan dengan baik bisa saja gagal di tengah jalan, apalagi pernikahan karena alasan dan tujuan trtentu, misalnya sekedar untuk menghalalkan nafsu birahi yang muncul sesaat. Apabila nafsu birahi sudah hilang, maka dengan seenaknya saja pelaku nikah sirri keluar dari komitmen mereka. Suami dengan seenaknya meninggalkan istrinya dan anaknya dan menikahi perempuan lain. Begitu pula sebaliknya, istri dengan seenaknya menelantarkan suami dan lari ke pelukan laki-laki lain. Tidak ada kekuatan hukum Negara yang dapat menghukum mereka, kecuali sebelumnya terdaftar secara resmi.

c. Poligami

Jika dikaitkan, poligami dapat dikatakan mempunyai hubungan yang erat dengan nikah *sirri*, terutama ketika makna nikah *sirri* dipahami sebagai pernikahan yang sembunyi-sembunyi (tanpa sepengetahuan pemerintah melalui pegawai pencatat nikah). Dikatakan berpoligami (*ta'addud zaujad*) apabila seorang laki-laki menikah lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan.

Poligami bukanlah suatu prinsip yang wajib dilaksanakan dalam syari'ah islam sehingga boleh menyebabkan berdosa jika tidak mengamalkannya. Poligami hanya merupakan perkara khusus untuk memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam keadaan dharurat.

Islam adalah agama fitrah yang sejalan dengan kebutuhan manusia dalam hidup berpasangan. Dari kebutuhan tersebut, islam membenarkan poligami yang merupakan amalan masyarakat turun-temurun sejak sebelum kedatangan islam. Untuk memastikan amalan poligami secara yang lebih adil dan dapat menjamin kesejahteraan hidup umat secara keseluruhan, islam telah menetapkan syarat-syarat tertentu yang wajib ditaati.²⁰

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُثْلَثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²¹

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.

²⁰ Burhanuddin S, *op.,cit.* h. 26-27

²¹ Depag RI, *op.,cit.* h 115

*dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²²

Dengan merujuk pada ayat tersebut dapat diketahui, bahwa kemampuan berlaku adil merupakan syarat utama bagi seseorang yang ingin berpoligami. Begitupula sebaliknya, apabila seseorang laki-laki merasa dirinya tidak mungkin mampu untuk berbuat adil, maka poligami haram baginya.

Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Izin dari pengadilan agama dapat diberikan seorang suami yang akan berpoligami apabila berlaku ketentuan :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun untuk dapat berpoligami syarat lain yang harus dipenuhi adalah :

- 1) Adanya persetujuan dari pihak istri, (baik secara lisan maupun tertulis)
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

²² *ibid.* h 143

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

berlakunya peraturan poligami yang mengharuskan adanya persetujuan dari pihak istri yang mendapatkn pengesahan dari pengadilan agama, ternyata menyebabkan seseorang yang mempunyai niat untuk poligami berusaha mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan secara *sirri*. Melalui pernikahan ini, mereka yakin akan mendapatkan kemudahan, di samping daapt menghindari dari beban hukum yang mungkin diterimanya.

d. Kendala birokrasi

Nikah sirri dapat didefenisikan melalui berbagai lingkup sudut pandang, diantaranya adalah yang terkait dengan pencatatan akta nikah secara resmi melalui pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama (KUA). Namun perlu diketahui, bahwa nikah tanpa dicatatkan secara resmi sudah berlangsung lama sebelum berlakunya ketentuan pencatatan sebagaimana dipahami sekarang ini, bahkan barangkali sejak disyari'atkannya nikah itu sendiri. Berdasarkan pemahaman tersebut, berarti tidak menutup kemungkinan adanya pengertian lain dari nikah *sirri*.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah merasa berkepentingan melakukan pendataan bagi setiap waraga negara yang melangsungkan pernikahan. Kebijakan semacam ini merupakan suatu hal yang lazim bagi suatu pemerintahan, bahkan negara-negara di dunia pun kemungkinan telah melakukannya. Meskipun mempunyai tujuan yang baik, terkadang

keberadaan institusi yang menjalankan pencatatan akta nikah sering dianggap memberatkan bagi kalangan tertentu. Mungkin karena lokasinya yang terlalu sulit untuk dijangkau atau karena prosedur yang berbelit-belit. Entah apa yang menjadi sebab anggapan itu, tetapi kenyataannya bahwa masih ada masyarakat yang melangsungkan pernikahan di luar institusi tersebut.

G. Bentuk-Bentuk Nikah *Sirri*

1. Perkawinan Gelap, yaitu kawin tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.²³
2. Perkawinan Liar, perkawinan tersebut oleh sebagian besar umat islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak didaftar atau dicatat pada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
3. Perkawinan secara sembunyi-sembunyi, salah satu alternatif yang sering difikirkan oleh saudara kita yang menikah adalah melakukan nikah *sirri*. Ada dua kemungkinan yang berkembang terhadap nikah *sirri* ini diantaranya adalah : *pertama*, nikah *sirri* adalah pernikahan sebagaimana yang bisa terjadi, hanya saja tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama. Pernikahan semacam ini secara agama sah, tetapi tidak memiliki legalitas formal yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bisa sewaktu-waktu terjadi masalah. *Kedua*, sebagian saudara kita memahami nikah *sirri*

²³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke-4, h. 71

sebagai bentuk pernikahan yang benar-benar rahasia, walimah yang berfungsi untuk mengumumkan juga tidak ada.²⁴

4. Perkawinan sipil, yaitu perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia karena ada sebab-sebab, baik karena takut atau menyembunyikan terhadap orang lain.²⁵
5. Perkawinan (nikah) gantung, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungan sebagai suami istri digantungkan pada suatu keadaan atau waktu dimasa yang akan datang. Menurut Hadikusumo, nikah gantung adalah nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, namun suami-istri belum tinggal serumah dan hidup bersama sebagai suami istri. Latar belakang terjadinya nikah gantung pada umumnya karena anak perempuan belum dewasa, sementara anak laki-laki telah dewasa, sehingga untuk hidup bersama sebagai suami-istri memerlukan waktu sampai anak perempuan menjadi dewasa.²⁶

Dari bentuk-bentuk nikah *sirri* di atas, kebanyakan dari masyarakat hanya mengetahui yang sering atau lazim disebut-sebut orang seperti nikah secara sembunyi-sembunyi.

H. Pengasuhan Anak Setelah Perceraian

Bagi keluarga yang sudah bercerai akan menimbulkan berbagai masalah dalam pengasuhan anak terutama bagi orang tua yang menikah lagi. Dalam hal

²⁴ Mohamad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 187

²⁵ Ahamad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka 3 (Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan)*, (Jakarta : Lentera, 2006), Cet. Ke-2, h. 142

²⁶ Effi Setiawati, *op.,cit*, h. 38

terjadi perceraian di desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang, maka anak pada umumnya mengikuti ibu untuk melanjutkan kehidupannya.

Mengingat pentingnya pengasuhan anak (*hadhanah*) demi mewujudkan generasi islami yang akan menjadi tulang punggung bangsa dan agama, maka perlu dilakukan didikan dan pemeliharaan anak semenjak dini yang lazim kita kenal dengan *hadhanah*.

Pendidikan yang paling tinggi adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu dan ayahnya. Pengawasan dan perlakuan mereka kepada anak yang dilakukan dengan baik dapat membantu pertumbuhan fisik dan psikisnya dengan baik, dan juga dapat membersihkan jiwa, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.²⁷

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 tentang hukum pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*”²⁸

Pada ayat ini orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarganya dalam ayat ini adalah anak.

Dengan melihat kenyataannya dan hambatan-hambatan pengasuhan anak yang terjadi dalam masyarakat matrilineal desa Pulau Lawas Bangkinang

²⁷ Sayiq Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), Cet. 1, jil.4, h. 140

²⁸ Depag RI, *op.cit*, h. 560

Seberang setelah perceraian dan juga melihat manfaat serta mudharat yang diakibatkan oleh hadhanah yang terjadi di daerah ini maka dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. Hadhanah dengan artian sekedar pemeliharaan dan perawatan terhadap anak yang belum mumayyiz atau masih kecil yang memang seharusnya dipelihara oleh ibu. Hal ini didasarkan pada :

- a. Dalil naqli yaitu al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^ط

Artinya : “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*”²⁹

Selain itu hadits Rasulullah juga menjelaskan pengasuhan anak yang masih bayi atau belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya yang berbunyi :

عنهما : يا هذا
 له وحجريه له
 يترعنه لها عليه به
 (وصحه الترميذى)

Artinya : “*dari Abdullah bin Umar r.a berkata : sesungguhnya seorang wanita berkata : ya Rasulullah sesungguhnya anakku ini perutku yang menjadi tempatnya, susukulah yang menjadi minumannya, pangkuankulah yang menjadi pemeliharaannya dan sesungguhnya ayahnya telah menthalakku dan hendak mengambil anaknya dari pangkuanku, lalu Rasulullah bersabda “engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau*

²⁹ Depag RI, *op.,cit*, h.57

belum menikah lagi” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Tarmizi)³⁰

- b. Dalil aqli yaitu pada dasarnya naluri seorang ibu lebih penyantun, lebih sayang, lebih lembut, dan lebih paham akan sesuatu yang didambakan dan dibutuhkan anak-anak pada usia tamyiz
2. Pengasuhan anak atau hadhanah dengan artian berhubungan dengan material terhadap anak pada usia tamyiz adalah menjadi tanggung jawab seorang ayah atau suami. Hal ini berlandaskan kepada dalil :

- a. dalil naqli dari al-Qur'an surat ath-Thalak ayat : 6 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

Artinya : “*dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.*”³¹

Selain itu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 juga mengisyaratkan hal yang sama :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya : “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*”³²

Dalam tafsir dijelaskan bahwa diwajibkan atas orang yang dilahirkan untuknya yaitu ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan

³⁰ Abu Daud Sulaiman Al-Asy'ast, *Shoheh Abu Daud*, (Beirut : Daarul Fikri, 1994), juz.2,

³¹ Depag RI, *op.,cit.* h. 559

³² *Ibid*, h. 78

cara yang ma'ruf. Ini mencakup semua baik yang masih dalam ikatan maupun telah diceraikan. Maka seorang ayah wajib memberinya makan artinya memberinya nafkah dan pakaian sesuai kondisinya.

- b. Dalil aqli bahwa pada kodratnya sang ibu dan anak secara fisik adalah lemah dan butuh kepada sang ayah yang mempunyai fisik yang kuat, oleh karena itu sangat wajar bila tanggung jawab dan beban nafkah dipikulkan kepada ayah sebagai kepala keluarga.

Mengingat pentingnya pengasuhan anak demi mewujudkan generasi yang islami yang akan menjadi tulang punggung bangsa dan agama, yang akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Karena anak merupakan amanah dari Allah SWT. Maka orang tua, terutama ayah yang berkewajiban atau bertanggung jawab untuk menjadikan keluarganya supaya dapat melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah agar selamat dunia akhirat.

BAB IV
AKIBAT PERCERAIAN NIKAH *SIRRI* TERHADAP ANAK
SERTA PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Akibat Perceraian Nikah *Sirri* Terhadap Kondisi Sosial Anak Setelah Perceraian

Pernikahan sirri sangat berdampak besar terhadap anak apabila terjadinya perceraian antara suami dan istri. Seperti penulis lihat dilapangan bahwa dampak yang terjadi adalah terjadinya perubahan sikap anak setelah terjadinya perceraian, pendidikan dan kesehatan anak kurang diperhatikan oleh mantan suami.

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang tokoh masyarakat bahwa anak yang jadi korban keluarga yang bercerai cenderung menjadi anak yang sangat nakal karena: ¹

- a. Seorang anak mempunyai sifat marah, frustrasi dan dia mau melampiaskannya. Sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma, memberontak dan sebagainya.
- b. Anak kehilangan figur otoritas, figur ayah. Waktu figur otoritas itu menghilang anak sering kali tidak terlalu takut pada ibu.
- c. Anak kehilangan jati diri sosialnya atau identitas sosialnya. Status sebagai anak cerai memberikan suatu perasaan dia orang yang berbeda dari anak-anak lain

¹ M. Nasir, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas, Tanggal 18 Maret 2011

Sehingga ibu yang harus menanggung semua tanggung jawab terhadap anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL VII
DAMPAK YANG DITIMBULKAN DARI PERCERAIAN NIKAH
SIRRI TERHADAP ANAK

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Kesehatan anak kurang diperhatikan	1	20 %
2	Pendidikan anak kurang diperhatikan	1	20 %
3	Terjadinya perubahan sikap anak	3	60 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab kesehatan anak kurang diperhatikan berjumlah 1 orang atau 20 %, responden yang menjawab pendidikan anak kurang diperhatikan berjumlah 1 orang atau 20 %, sedangkan yang menjawab terjadinya perubahan sikap anak berjumlah 3 orang atau 60 %, seperti yang dikatakan oleh responden (Wati, istri yang diceraikan) bahwa setelah bercerai mantan suaminya tidak pernah lagi memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak-anaknya terlebih lagi terhadap perubahan sikap anaknya yang dahulunya ceria dan setelah terjadi perceraian tersebut sikap anak berubah menjadi murung atau tidak lagi ceria. ²

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari perceraian nikah sirri sangat berpengaruh kepada kesehatan dan pendidikan anak dan juga terhadap sikap anak.

² Wati, (istri yang diceraikan), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas, tanggal 18 maret 2011

Akibat dari perceraian nikah sirri juga berdampak kepada akte kelahiran Anak. Kesempatan mendapatkan akte kelahiran tidak akan dapat karena perkawinannya tidak sah menurut undang-undang dan tidak tercatat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL XIV
KESEMPATAN MENDAPAT AKTE KELAHIRAN

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Pernah	0	0 %
2	Tidak Pernah	5	100 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak seorangpun responden yang menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan kesempatan akte kelahiran anaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perceraian nikah sirri antara suami istri, maka susah untuk membuat akte kelahiran anak. Seperti yang dikatakan oleh Wati (istri yang diceraikan), bahwa dia tidak bisa mengurus akte kelahiran anaknya untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Karena pernikahan yang mereka lakukan adalah nikah sirri yang tidak sah menurut undang-undang perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama³.

Setelah perceraian kondisi psikologis anak sering mengalami tekanan dari masyarakat dan dari teman-temannya sehingga batin anak tertekan dan merasa malu dan membuatnya terasingkan dari masyarakat, karena anak tidak

³ Anita (Istri yang Diceraikan), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas, Tanggal 12 April 2011

mepunyai seorang ayah yang dia banggakannya, dalam hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL IX
PSIKOLOGIS ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	malu	3	60 %
2	Biasa-biasa saja	1	20 %
3	Tidak malu	1	20 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab malu berjumlah 3 orang atau 60 %, seperti yang dikatakan oleh responden (Asti, istri yang diceraikan) mengatakan bahwasanya setelah perceraian anaknya merasa malu dan sering di ejek oleh teman-temannya karena tidak mempunyai ayah⁴, yang menjawab biasa-biasa saja berjumlah 1 orang atau 20 %, sedangkan yang menjawab tidak malu berjumlah 1 orang atau 20 % .

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa perceraian nikah sirri berakibat fatal terhadap anak, seperti kondisi psikologis anak setelah perceraian terjadinya perubahan sikap anak menjadi pribadi yang tertutup dan merasa minder dari teman-temannya . Sebagaimana dikatakan oleh Nurhaida : bisanya anak Wati sering bermain kerumah setiap harinya tetapi semenjak bercerai Ibu dan ayahnya dia tidak pernah datang kerumah untuk bermain bersama Ita

⁴ Asti, (istri yang diceraikan) *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas, Tanggal 19 Maret 2011

(anak saya), dia pernah datang tapi sikapnya berubah menjadi pemalu dan minder.⁵

Setelah terjadinya perceraian pengasuhan anak lebih banyak dibebankan kepada pihak ibu.⁶ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil angket yang telah disebarkan kepada responden yang menikah *sirri*, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL X
SETELAH BERCERAI YANG MENGASUH ANAK-ANAK

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1	Istri	5	100 %
2	Suami	0	0 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak seorangpun yang menjawab suami yang mengasuh anak setelah perceraian, dan sebanyak 5 orang responden atau 100 % menjawab bahwa setelah perceraian yang mengasuh anak-anak adalah ibunya.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak setelah terjadi perceraian dalam masyarakat desa Pulau Lawas Bangkinang Seberang diambil alih oleh Ibu baik yang berkenaan dengan keperluan jasmani dan rohani yang dibutuhkan anaknya.

Baik dan buruknya kesehatan jasmani dan rohani seorang anak setelah perceraian tidak terlepas dari peran seorang ayah yang selalu melungkan

⁵ Nurhaida (masyarakat), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas, Tanggal 19 Maret 2011

⁶ M. yunus, (tokoh masyarakat), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas, Tanggal 20 Maret

waktu-waktu khusus bersama anaknya. Tetapi, kenyataannya di desa Pulau Lawas tidak seperti yang di harapkan, setelah terjadi perceraian suami jarang meluangkan waktu-waktu khusus bersama anak-anaknya, bahkan ada juga yang tidak pernah. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL XI
MANTAN SUAMI MELUANGKAN WAKTU-WAKTU KHUSUS
BERSAMA ANAK-ANAK

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ada	0	0 %
2	Kadang-kadang	1	20 %
3	Tidak pernah	4	80 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui tidak ada responden yang menjawab bahwa mantan suaminya yang pernah meluangkan waktu khusus bersama anak-anaknya, responden yang menjawab bahwa mantan suaminya jarang meluangkan waktu bersama anak-anaknya berjumlah 1 orang atau 20 %, sedangkan responden yang menjawab bahwa mantan suaminya tidak pernah sama sekali meluangkan waktu khusus bersama anak-anaknya sebanyak 4 orang responden atau 80 %, Seperti yang dikatakan oleh Asti : selama saya bercerai dengan suami, saya tidak pernah melihat mantan suami saya untuk menjenguk anaknya untuk menghibur atau meluangkan waktu bersama anaknya, karena mantan suami saya mungkin membenci saya dan anak saya.⁷

⁷ Asti, (Istri yang diceraikan), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas, Tanggal 20 Maret 2011

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mantan suami jarang meluangkan waktu-waktu khusus bersama anaknya, bahkan ada juga yang tidak pernah.

B. Akibatnya Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian

Nafkah anak sangat penting diberikan oleh suami kepada anaknya setelah terjadinya perceraian, karena itu merupakan penyangga hidup untuk anaknya kelak.⁸ Di desa Pulau Lawas kecamatan Bangkingan Seberang kenyataannya tidak seperti itu, bahwa ada yang tidak terpenuhi setelah terjadinya perceraian tersebut yaitu tidak terpenuhinya nafkah anak. Disamping itu berdasarkan observasi dan angket yang penulis lakukan bahwa nafkah anak lebih banyak dibebankan kepada ibu setelah terjadi perceraian

Hal ini dibenarkan oleh mantan suami yang menyatakan bahwa dia tidak pernah lagi memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya terutama masalah nafkah sampai anak dewasa.⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL XII
NAFKAH BELANJA ANAK SETELAH PERCERAIAN OLEH SUAMI

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	ya	0	0 %
2	Kadang-kadang	1	20 %
3	Tidak Pernah	4	80 %
Jumlah		5	100 %

⁸ Sudirman, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas, Tanggal 25 Maret 2011

⁹ Badu (Suami), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas, Tanggal 10 April 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada responden yang menjawab bahwa mantan suami memberi nafkah kepada anak-anaknya setelah perceraian, 1 orang responden atau 20 % jarang memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan 4 orang responden atau 80 % memberikan jawaban bahwa mantan suami tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah terjadi perceraian, seperti yang dikatakan oleh Asri (istri yang diceraikan), bahwa setelah perceraian mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah belanja dan tanggung jawabnya terhadap anaknya, karena istri keduanya melarang memberikan haknya kepada anaknya¹⁰.

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah terjadi perceraian, maka yang menafkahi anak setelah perceraian dibebankan pada mantan istrinya.

Setelah terjadi perceraian antara suami istri, suami jarang memberikan nafkah kepada anaknya seperti kebutuhan hidup sehari-hari terutama dalam pendidikannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL XIII
NAFKAH PENDIDIKAN ANAK SETELAH PERCERAIAN

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Lancar	0	0 %
2	Kurang Lancar	1	20 %
3	Tidak Lancar	4	80 %
Jumlah		5	100 %

¹⁰ Asri (Istri yang diceraikan), Wawancara, di Desa Pulau Lawas, Tanggal 11 April 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak seorangpun responden yang menjawab mantan suaminya lancar memberikan biaya pendidikan, yang menjawab bahwa mantan suaminya kurang lancar memberikan biaya pendidikan berjumlah 1 orang atau 20 %, sedangkan yang menjawab suaminya tidak lancar memberikan biaya pendidikan berjumlah 4 orang atau 80 %. Hal ini dibenarkan oleh Anita (istri yang diceraikan). Ia menyebutkan pernyataannya, sebelum terjadi perceraian segala pembiayaan pendidikan anak lancar-lancar saja, dan setelah terjadi perceraian semuanya berubah 100%, artinya suami tidak lagi memberikan nafkah Pendidikan pada anaknya.¹¹

Dari data di atas dapat diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri, suami lebih banyak tidak memberikan atau memperhatikan pembiayaan pendidikan anak-anaknya, karena pendidikan adalah membentuk diri anak agar jauh lebih baik dan untuk memperoleh masa depan anak yang cerah.

Anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada Ayah dan Ibu yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Seperti kesehatan anak, ini sangat perlu diperhatikan oleh suami setelah terjadinya perceraian. Namun di desa pulau lawas setelah bercerai, suami tidak memperhatikan kesehatan anaknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

¹¹ Anita (Istri yang Diceraikan), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas, Tanggal 12 April 2011

TABEL VIII
PERHATIAN MANTAN SUAMI TERHADAP KESEHATAN ANAK
SETELAH PERCERAIAN

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya, Peduli	0	0 %
2	Kurang Peduli	1	20 %
3	Tidak Peduli	4	80 %
Jumlah		5	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak seorangpun responden yang menyatakan bahwa mantan suami peduli terhadap kesehatan anak setelah perceraian, 1 orang responden atau 20 % yang mengatakan bahwa mantan suami kurang peduli terhadap kesehatan anak, 4 orang responden atau 80 % yang mengatakan tidak peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri, mantan suami tidak mempedulikan kesehatan anak. Seperti yang dikatakan oleh Wati (istri yang diceraikan), bahwa mantan suaminya tidak pernah memperhatikan kesehatan anaknya, karena mantan suaminya lebih memntingkan anaknya dari pernikahannya yang sah menurut hukum.

Begitu juga yang dikatakan oleh Saleha : sewaktu saya bersilaturahmi kerumah wati saya melihat anaknya sedang sakit, lalu saya menanyakan kepada Wati supaya anaknya dibawa ke Dokter, lalu wati beralasan dia tidak mempunyai uang untuk membawa anaknya ke dokter. Sebabnya adalah

dikarenakan mantan suaminya jarang sekali memperhatikan kesehatan anaknya.¹²

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan, setelah terjadinya perceraian nikah sirri, psikologis anak terganggu karena tekanan-tekanan dari masyarakat dan dari teman-temannya. Sedangkan nafkah anak ditanggung oleh ibu. Tanggung jawab seorang ayah dalam pemberian nafkah terhadap anak-anaknya kurang baik, bahkan ada yang tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Padahal anak sebagai manusia biasa yang membutuhkan sandang, pangan dan papan. Dan juga sebagai seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu jauh lebih baik. Di samping itu ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Akibatnya ibu harus banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anaknya.

C. Tinjauan Hukum Islam Akibat Perceraian Nikah *Sirri* Terhadap Anak

Bila dikaji secara lebih lanjut, nikah bukanlah semata-mata mengikat hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, tetapi menimbulkan konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi juga bagi anak-anak, hubungan keluarga, bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian pernikahan tidak dapat dianggap selesai hanya dengan berlangsungnya akad nikah, namun juga mempertimbangkan aspek lainnya.

¹² Saleha (masyaraakt), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas, Tanggal 19 Maret 2011

Di antara akibat yang ditimbulkan dari perkawinan adalah adanya kewajiban bagi suami untuk menafkahi keluarganya, baik nafkah zahir maupun nafkah bathin. Istri juga memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangganya dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah itu kewajiban suami istri adalah memberi pendidikan yang baik dan menjaga kesehatan anak-anaknya.

Namun bagi keluarga yang sudah bercerai akan menimbulkan berbagai masalah dalam pengasuhan anak terutama bagi orang tua yang menikah lagi. Dalam hal terjadi perceraian nikah sirri di desa Pulau Lawas kecamatan Bangkinang Seberang, maka anak pada umumnya mengikuti ibu untuk melanjutkan kehidupannya. Ibu tidak hanya merawat dan mendidik anak, tetapi juga bertanggung jawab untuk mencukupi nafkahnya. Apapun yang dibutuhkan anak dibebankan kepada pihak ibu sebagai orang yang mengasuhnya.¹³

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas diketahui bahwa secara umum pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap anak setelah terjadi perceraian di desa Pulau Lawas masih sangat kurang. Dengan kata lain, setelah bercerai ayah seolah-olah terlepas dari tanggung jawab terhadap anaknya. Hal ini tidak menyangkut pemberian nafkah semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab pendidikan dan pemeliharaan atau kasih sayang.

Sesungguhnya Islam memiliki perhatian yang besar terhadap anak-anak, sehingga banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang memberikan penekanan

¹³ M. Yasir , (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, di Desa Pulau Lawas 13 April 2011

terhadap permasalahan tanggung jawab ayah terhadap anaknya. Pendekatan Islam terhadap anak-anak, secara umum bisa dilihat dari beberapa prinsip. Pertama sesuai dengan perintah Allah, maka hendaknya tidak menyebabkan kesengsaraan terhadap orang tuanya, sebaiknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya.

Sementara ayah tidak lagi mempedulikan kebutuhan dari anak apalagi ayah telah dahulu menikah dengan wanita lain secara sah, maka hari-harinya dihabiskan dirumah isterinya yang sah serta ia hanya menyibukkan diri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang baru dibinanya itu. Dan melupakan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya yang ditinggalkan bersama bekas isteri yang telah diceraikan. Hanya sebagian kecil dari suami atau ayah yang masih mau bertanggung jawab terhadap anaknya bila terjadi perceraian.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya : *Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*¹⁴

Dari ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah dituntut memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada anak. Kewajiban seorang ayah terhadap anak tidak hilang karena ia telah bercerai. Hal ini disebabkan karena hubungan ayah dengan anak merupakan hubungan darah

Dalam ajaran Islam, apabila istri bercerai, sedang keduanya telah memiliki anak yang belum mengerti kemashlahatan dirinya atau belum *mumayyiz*

¹⁴ Departemen Agama RI, *op,cit.*, h 57

(berusia 12 tahun), maka ibu anak itulah yang berhak mendidik dan merawat anak itu, namun nafkah si anak tetap ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

لها عليه به)
(صححه الترميذی)

Artinya : *Lalu Rasulullah bersabda “engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Tarmizi) ¹⁵*

Pandangan ajaran Islam terhadap anak, menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash al-Qur’an dan al-Hadits. Oleh karena itu selain pemberian nafkah, dalam pandangan Islam kewajiban seorang ayah terhadap anak setelah perceraian adalah anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak itu kelak bertanggung jawab dalam memelihara eksistensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan.

Pada hakikatnya ayah merupakan sumber kekuasaan yang memberikan pendidikan anaknya tentang manajemen dan kepemimpinan serta berfungsi sebagai penghubung antara keluarga dan masyarakat dengan mendidik anaknya tentang cara berkomunikasi terhadap sesamanya. Di samping itu, ayah merupakan hakim dalam perselisihan yang memberikan pendidikan anaknya berupa sikap tegas, menjunjung tinggi keadilan tanpa memihak yang

¹⁵ Abu Daud Sulaiman Al-Asy’ast, *Shoheh Abu Daud, op.cit.*, h 156

salah, dan seorang yang rasional yang mendidik anaknya tentang dasar-dasar pengembangan daya nalar dan intelek.

Berdasarkan keterangan di atas jelaslah bahwa seorang ayah memiliki peran sentral dalam proses pendidikan anak. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap pendidikan anak karena menyangkut masa depannya. Pendidikan yang diberikan kepada seorang anak akan menentukan baik buruknya seseorang dimasa depan.

Seorang anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran islam. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan. Ketentuan ini ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Isra (17) ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

artinya : *Dan janganlah kamu membunuh anakanakmu karena takut kemiskinan. Inilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu, sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang amat besar. (Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 31)*¹⁶

Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu tanggung jawab syariat islam yang harus diemban dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu : Pertama, aspek duniawi yang meliputi pengampunan dan keselamatan

¹⁶ Departemen Agama RI, *op.,cit*, hal. 428-429.

di dunia kedua, aspek ukhrawiyah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.

Jika diperhatikan pengertian kesejahteraan dalam aspek duniawiyah tersebut disini termasuk di dalamnya tentang biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata, akan tetapi juga biaya pendidikan anak. Pendidikan ini penting disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi

Mengingat pentingnya nafkah anak demi mewujudkan generasi yang Islami yang akan menjadi tulang punggung bangsa dan agama, maka perlu dilakukan didikan dan pemeliharaan anak semenjak dini. Pendidikan yang paling tinggi adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu ayahnya. Pengawasan dan perlakuan mereka kepada anak yang dilakukan dengan baik dapat membantu pertumbuhan fisik dan psikisnya dengan baik, dan juga dapat membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya dimasa yang akan datang.¹⁷

Menurut ajaran Islam, tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang penting dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami isteri demi kemaslahatan anak, kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), Cet.1, jil.4, h.140.

dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik. Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah, di sisi lain adalah amanah yang jika orang tua berhasil menjaga dan menjalankannya justru nikmat bertambah dengan anak yang saleh dan berbakti serta mendoakan orang tuanya, jika orang tua gagal berarti ia telah mengkhianati amanah sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab.¹⁸

Sehingga dalam Islam anak juga disebut sebagai fitnah dan cobaan Allah swt. kepada orang tuanya, kekayaan dan keluarga yang besar adalah suatu ujian dan percobaan, semuanya dapat berbalik menjadi sumber keruntuhan jika salah ditangani atau jika kecintaan kepadanya justru menyisihkan kecintaan kepada Tuhan.¹⁹ Anak disebut cobaan karena ia menjadi tolok ukur kualitas hidup dan kepribadian orang tuanya yang tercermin dari perlakuannya terhadap anak apakah membawa pada kebaikan atau keburukan. Kecintaan sejati seseorang kepada anak merupakan konsistensi kecintaan kepada Tuhan untuk menjaga dan memelihara diri dan keluarganya dari kesengsaraan di akhirat

Firman Allah SWT surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”²⁰

¹⁸ Abdurrahman al-Nahlawi, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983). cet-2, hal. 73-4.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta : Paramadina, 1997). hal. 116.

²⁰ Depag RI, *op.,cit*, h. 560.

Pada ayat ini orang tua diprintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarganya dalam ayat ini adalah anak.

Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka dalam kitabnya tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa mengakui beriman saja belum cukup, mestiah ia dipelihara dan dipupuk terutama dengan dasar iman dan hendaklah orang menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya (seisi rumah tangganya) dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka.²¹

Bahkan, jika para orang tua gagal mendidik anak-anaknya, tidak mustahil anak-anak itu akan menjadi musuhnya, sebagaimana firman Allah dalam surat At Taghaabun ayat 14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya : *Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²²

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya : Yayasan Latimojang 1981), jilid ke-XXVIII

²² Depag RI, *op.,cit*, h. 410

berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Selain pemberian nafkah dan pendidikan, seorang ayah juga bertanggungjawab terhadap pemberian kasih sayang kepada anak. Seorang ayah merupakan pelindung bagi anak-anaknya sehingga anak merasa tentram dan nyaman. Kewajiban memberikan kasih sayang merupakan hal yang mutlak meskipun seorang ayah telah bercerai dengan istrinya.

Pengaruh ayah terhadap anak sangat besar dalam bentuk kepribadian anak. Ayah merupakan penolong utama bagi anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, bilamana mau mendekati dan dapat memahami hati anak-anaknya.

23

Pemberian kasih sayang yang merupakan perbuatan yang sangat terpuji dalam islam. Ayah yang bertanggung jawab akan selalu memperhatikan kondisi fisik dan batin anaknya serta selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Hal ini disebabkan seorang ayah merupakan tempat perlindungan bagi anak serta tempat pengaduan berbagai masalah pribadi yang dihadapinya.

Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin

²³ Dzakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h 35

bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.²⁴

Mengingat pentingnya nafkah anak demi mewujudkan generasi yang Islami yang akan menjadi tulang punggung bangsa dan agama, yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Karena anak merupakan amanah dari Allah SWT kepada orang tua baik yang masih dalam ikatan perkawinan maupun telah bercerai, tanggung jawab orang tua terutama ayah sebagai pemimpin keluarga, untuk menjadikan keluarganya terutama anak supaya melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT supaya selamat Dunia dan Akhirat.

Dikaitkan dengan kondisi, baik dari segi nafkah, pendidikan, kesehatan, kasih sayang setelah terjadinya perceraian di desa Pulau Lawas, maka terlihat masih kurang kesadaran ayah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Hal ini akan berdampak buruk bagi kehidupan anak di masa mendatang karena kebutuhannya tidak terpenuhi.

Ditinjau dari hukum Islam, sikap tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak sesuai dalam syari'at islam, karena islam menuntut bahwa seorang ayah harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya setelah terjadinya perceraian.

²⁴ Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun 1999), hal. 166-167.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu:

1. Hak nasab (keturunan)
2. Hak *radla'* (menyusui)
3. Hak *hadlanah* (pemeliharaan)
4. Hak *walâyah* (wali)
5. Hak nafkah (*alimentasi*).²⁵

Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya. Hak *Radla'* adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab di hadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi atau pun sudah bercerai. *Hadlanah* adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. *Walâyah* disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode *hadlanah* sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta

²⁵ *ibid*, hal. 39.

anak. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab.²⁶

Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.

²⁶ *Ibid*, hal. 7-19.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pernikahan *sirri* sangat berdampak besar terhadap anak apabila terjadinya perceraian antara suami dan istri. Dampak yang terjadi setelah perceraian nikah *sirri* adalah terjadinya perubahan sikap anak setelah terjadinya perceraian, pendidikan dan kesehatan anak kurang diperhatikan oleh mantan suami.
2. Dampak yang ditimbulkan dari perceraian nikah *sirri* terhadap nafkah anak adalah kurangnya kesadaran ayah terhadap pembiayaan pendidikan anaknya, kurangnya perhatian suami terhadap pembiayaan kesehatan anak sehingga nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya maka setelah terjadinya perceraian tanggung jawab tersebut dibebankan kepada ibu.
3. Setelah terjadinya perceraian seorang suami harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya yang sesuai dengan hukum islam, baik itu dari segi nafkah, pendidikan, kesehatan dan kasih sayang, karena pendidikan yang paling tinggi adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu dan ayahnya. Islam menuntut bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban

orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis merekomendasikan :

1. Agar dapat memberi penerangan yang mendalam kepada ayah meskipun pengasuhan anak setelah perceraian ada pada ibu namun nafkah anak anak tetap menjadi tanggung jawab ayah yang akan diminta pertanggung jawaban baik di dunia maupun di akhirat.
2. Memberikan penyuluhan mengenai hukum Islam kepada masyarakat agar dapat terlaksananya hukum Islam dengan baik dan benar terutama tentang nafkah anak setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rahman 1. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, jakarta : Gema Insani, 2003, Cet I
- Abd, Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarata : Prenada Media, Th 2000
- Abdurrahman al-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha fi at-Bail wa al-Madrasah wa al-Mujtama'. (Beirut : Dar al-Fikr, 1983). cet-2.
- Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Sulam, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1992), j uz. I
- Abustani 11yas, Nikah.Wulah dalam Islam (Jakarta: Restu Ilahi, 2004)
- Ahamad Asy-Syarbashi, Yas'alunaka 3 (Tanya Jawab Lengkap Tenlang Agama dan Kehidupan), (Jakarta : Lentera, 2006), Cet. Ke-2
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta : U11 Press, 2000, Ctk. Ke-9
- Al-Hafizdh Ibn Hajar Al'asqoIani, Terjemahan Bulughul Al-Maram, (Bandung CV Ponogoro, t. th)
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta : Dian Rakyat, 1986
- Burhanuddin S, Nikah Siri, Pustaka Yogyakarta : Yustisa, 2010, Cet 1 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya : CV. Toha Putra, 1989)
- Djamil Latif, Aneka hokum Perceraian di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981
- Effii Setiawati, Nikah Sirri Tersesal di.Jalan Yang Benar, (Bandung : Kepustakaan Eja Insane, 2005), Cet. Ke- I
- Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya, Jakarta : Visi Media, 2007, Cet I K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan, Jakarta : Ghalia Indonesia 1978.
- Lukman A. Irfan, Nikah, (Yogyakarta : PT. Pustaka Insani Madani, 2007)
- Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acura Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke-4

- Mohamad Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke- I
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-3
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta : Paramadina, 1997).
- Nurdin, dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Ki-itis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)* Jakarta : Kencana, 2006.
- Ramulyo Idris, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang A16.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 1974.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1995), Cet. Ke-10
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Gema. Insani, Jakarta : 2003, Cet 1
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), cet I
- Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al Khautsar, 2008), Cet. Ke-5
- Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, Himmah Media, Jakarta 2010, Cet 1
- Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-1
- Undang-Undang No. I Tahun 1972, pasal 22*

